BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Profil Provinsi Banten

Secara umum Provinsi Banten merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 257,93 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Provinsi Banten seluas 9.662,92 km^2 dengan wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri atas empat wilayah kabupaten dan empat wilayah kota.

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 luas daratan kabupaten/kota di Provinsi Banten yaitu: Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km^2), Kabupaten Lebak sebagai kabupaten terluas di Provinsi Banten (3.426,56 km^2), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km^2), Kabupaten Serang (1.734,28 km^2), Kota Tangerang (153,93 km^2), Kota Cilegon (175,50 km^2), Kota Serang (266,71 km^2) dan

Kota dengan luas daratan terkecil yaitu Kota Tangerang Selatan (147,19 km^2).

Berdasarkan posisi geografisnya, bagian utara Provinsi Banten berbatasan dengan Laut Jawa, bagian selatan Provinsi Banten berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian barat Provinsi Banten berbatasan dengan Selat Sunda, kemudian bagian timur Provinsi Banten berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

2. Kondisi Pembangunan Gender, Kemiskinan, Pengeluaran Per Kapita dan Pembangunan Manusia di Provinsi Banten

a. Kondisi Pembangunan Gender di Provinsi Banten

Keberhasilan pembangunan gender di Provinsi Banten ditandai dengan diraihnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat madya pada tahu 2010, APE tingkat pratama ditahun 2012 serta APE tingkat utama pada tahun 2016 dan 2018. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat yang diberikan dua tahun sekali atas kinerja

pemerintah provinsi dalam melakukan pemberdayaan serta pelindungan terhadap perempuan dan anak.[1]

Pembangunan gender di Provinsi Banten tercermin dari angka IPG yang tumbuh seiring dengan meningkatnya angka IPM. Ini berarti telah terjadi penurunan perbedaan perlakuan pada perempuan pembangunan berbasis manusia berhasil tercapai. Meskipun ketimpangan gender masih ada, namun pencapaian pembangunan gender menjadi cerminan bahwa upaya program pembangunan pengarusutamaan gender di Provinsi Banten dilaksanakan dengan baik.

Capaian pembangunan gender belum merata pada setiap daerah di Provinsi Banten. Penghargaan APE tingkat utama berhasil diraih Tangerang selatan selama 2 kali. Sayangnya APE belum pernah diraih sama sekali oleh Kabupaten Pandeglang. Adapun untuk kabupaten/kota lainnya telah menerima penghargaan APE sebagai apresiasi pencapaian pembangunan gender meskipun jumlahnya bervariasi.

---

[1] Statistik, *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten 2019*, h. 41.

b. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Banten

Kemiskinan masih menjadi penyakit kronis yang mengintai masyarakat di Provinsi Banten. Hal ini karena kemiskinan merupakan permasalahan yang meliputi setiap aspek kehidupan baik dari aspek perekonomian, sosial maupun budaya. Sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Tingkat kemiskinan yang dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada tahun 2020 sebesar 5,92 %, dan sebanyak 776.000 penduduk di Provinsi Banten berada dibawah garis kemiskinan. [2] Tingkat kemiskinan pada tahun 2020 ini menjadi yang tertinggi disepanjang tahun 2013 – 2020. Seperti yang telah diketahui pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, pengurangan jam kerja, menurunnya penghasilan masyarakat, dan kesulitan lainnya yang berdampak

[2] Statistik, *Provinsi Banten Dalam Angka 2021*, h.308.

pada meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Banten.

Persentase penduduk miskin di pedesaan sebesar 8,18 % lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan sebesar 5,03 %.[3] Adapun daerah perkotaan di Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 473.000 lebih banyak dibandingkan daerah pedesaan sebanyak 303.000 penduduk miskin.[4]

c. Kondisi Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Banten

Pengeluaran per kapita dapat dipengaruhi oleh faktor konsumsi, sosial ekonomi maupun budaya yang kemudian akan membentuk pola konsumsi masyarakat. pola konsumsi masyarakat ini kemudian digunakan pemerintah untuk melakukan perencanaan dan kebijakan pemerintah dalam pengambilan suatu keputusan.

---

[3] Badan Pusat Statistik, *Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten September 2020* (Banten: BPS Provinsi Banten, 2021), h.4.

[4] Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2020*, h. 109.

Persentase pengeluaran perkapita di Provinsi Banten pada Maret 2020 untuk pengeluaran makanan sebesar 49,88 % dan untuk pengeluaran bukan makanan sebesar 50,12 %. Adapun pengeluaran per kapita disetiap daerah itu beragam, seperti untuk daerah perkotaan pengeluaran didominasi oleh pengeluaran bukan makanan sebesar 52,38 %, kemudian masyarakat pedesaan menggunakan pendapatannya didominasi untuk pengeluaran makanan sebesar 59,11 %.[5] Pengeluaran perkapita untuk non makanan di perkotaan lebih besar dibandingkan wilayah pedesaan, ini mencerminkan terdapat perbedaan gaya hidup masyarakat perkotaan yang lebih memprioritaskan mengkonsumsi barang-barang dibandingkan makanan. Sedangkan masyarakat pedesaan lebih memprioritaskan kebutuhan konsumsi makanan dari pada kebutuhan bukan makanan.

[5] Badan Pusat Statistik, *Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Provinsi Banten 2020* (Banten: BPS Provinsi Banten, 2021), h. 15.

Pengeluaran per kapita dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan yang dicapai penduduk. Jika pengeluaran per kapita didominasi untuk pengeluaran makanan, ini mencerminkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk. Kemudian semakin kecil pengeluaran per kapita untuk konsumsi bukan makanan, ini mencerminkan semakin sejahtera penduduknya. Kabupaten Lebak tercatat sebagai kabupaten dengan pengeluaran konsumsi untuk makanan tersebsar di Provinsi Banten yaitu sebesar 58,87%. Adapun Tangerang Selatan yang memiliki pengeluaran per kapita untuk makanan terkecil di wilayah Provinsi Banten yaitu sebesar 39, 56 %. Kota Tangerang Selatan sebagai kota yang dipandang paling sejahtera di Provinsi Banten berdasarkan pengeluaran per kapita, disebabkan oleh letak kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta, ini menjadikan baik secara langsung maupun tidak aktivitas harian masyarakatnya dipengaruhi oleh pola perilaku ekonomi di Jakarta.

d. Kondisi Pembangunan Manusia di Provinsi Banten

Capaian pembangunan manusia di Provinsi Banten selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Peningkatan capaian pembangunan manusia ini dipengaruhi oleh meningkatnya indikator-indikator pembangun dari Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri seperti umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Kondisi pembangunan manusia di Provinsi Banten yang diukur dengan angka IPM pada tahun 2020 sebesar 72,45 % belum mampu mencapai pembangunan manusia yang ideal yaitu 100 %.[6] Namun pada dasarnya jika merujuk pada kategorisasi status pembangunan manusia termasuk pada kategori tinggi.

Peningkatan pembangunan manusia terjadi disetiap daerah di wilayah Provinsi Banten. Hanya saja

[6] Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2020*, h. 53.

adanya perbedaan letak geografis, potensi sumber daya alam dan manusia, adanya perbedaan ketenagakerjaan hingga struktur ekonomi di setiap daerah menjadikan perbedaan pencapaian pembangunan manusia di setiap daerah. Perbedaan inilah yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah di Provinsi Banten.

3. Analisis Deskripsi Variabel

a. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks yang digunakan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia berbasis gender, yaitu pencapaian pembangunan laki-laki dan perempuan berdasarkan rasio dari Indeks Pembangunan Manusia laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia perempuan sehingga dapat diketahui implikasinya. IPG diukur berdasarkan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Gender dapat mengungkapkan ketidakadilan ataupun ketimpangan yang terjadi pada pencapaian laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender disini merupakan keadaan tidak adil sebagai akibat dari sistem maupun struktur sosial yang dapat merugikan salah satu pihak. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat yang tidak dapat ditolak oleh laki-laki dan perempuan sebagai kehendak Tuhan. Namun gender merupakan perbedaan yang berkaitan dengan perbedaan peranan, kedudukan, serta tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang ditetapkan oleh struktur sosial masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang disesuaikan dengan norma, kepercayaan serta adat yang dianut masyarakat. Perbedaan gender bukanlah suatu masalah jika tidak diikuti oleh tindakan diskriminasi yang merugikan salah satu pihak.

Adapun pencapaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013 – 2020 sebagai berikut:

Gambar 4.1

Variabel Independen (X1)

IPG Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2013 – 2020

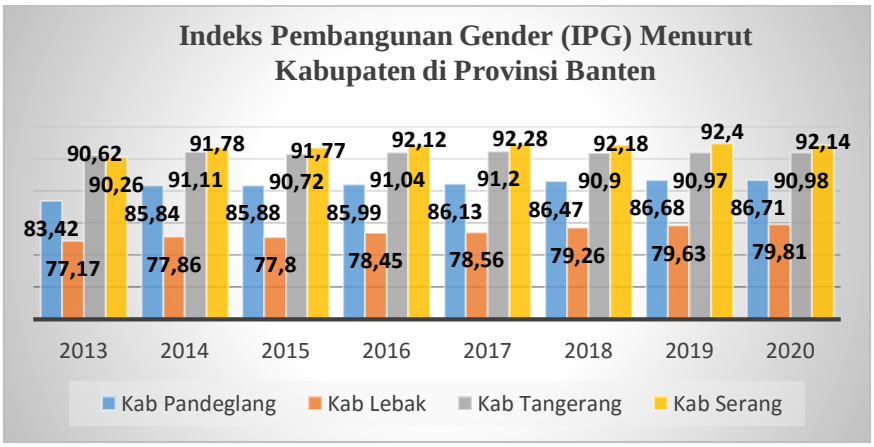

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan grafik IPG di atas, diketahui IPG daerah kabupaten di Provinsi Banten mengalami fluktuasi selama tahun 2013 – 2020. Pada tahun 2020 Kabupaten Lebak menjadi kabupaten dengan IPG terendah di Provinsi Banten sebesar 79,81, diikuti oleh Kabupaten Pandeglang sebesar 86,71. Perbedaan peraihan IPG ini mencerminkan kondisi ketimpangan gender yang dipengaruhi oleh kondisi geografis hingga potensi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Adapun untuk Indeks Pembangunan Gender daerah perkotaan dapat dideskripsikan pada grafif berikut:

Gambar 4.2

Variabel Independen (X1)

IPG Kota di Provinsi Banten Tahun 2013 – 2020

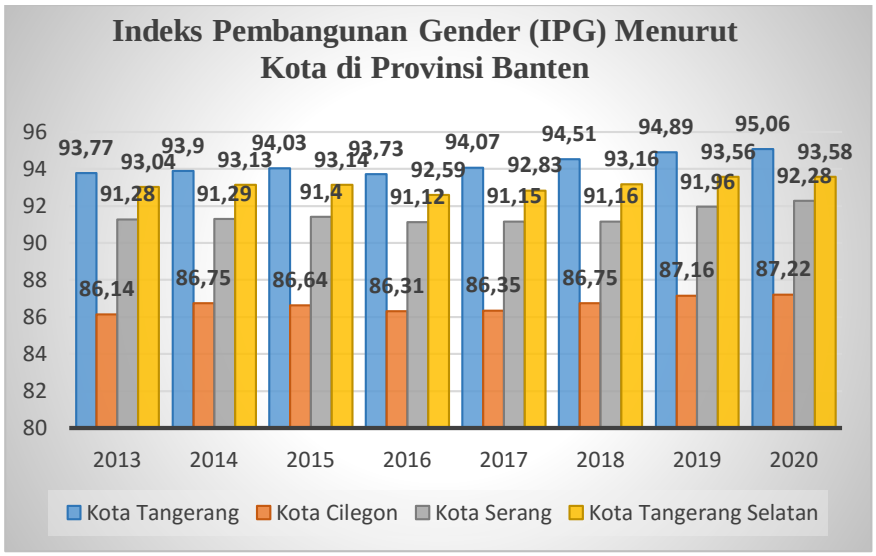

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan grafik IPG di atas, dapat diketahui Indeks Pembangunan Gender kota tertinggi di Provinsi Banten pada tahun 2020 diraih oleh Kota Tangerang sebesar 95,06 kemudian diikuti oleh Kota Tangerang Selatan sebesar 93,53. Adapun Kota Cilegon menjadi kita dengan IPG terendah pada daerah kota di Provinsi Banten dengan angka IPG sebesar 87,22. Ketimpangan gender akan semakin kecil jika angka IPG mendekati nilai 100, dan sebaliknya jika angka IPG semakin

menjauhi nilai 100 maka ketimpangan gender semakin besar. Berdasarkan data IPG Provinsi Banten terlihat masih terjadi kesenjangan dalam pencapaian kapabilitas atau kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilihat berdasarkan angka IPG yang kurang dari nilai 100.

b. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun non makanan yang dihitung dari sisi pengeluaran perkapita per bulan. BPS mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri atas dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Sehingga seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbula dibawah garis kemiskinan. Adapun grafik tingkat kemiskinan di Provinsi Banten menurut kabupaten/kota sebagai berikut:

Gambar 4.3
Variabel Independen (X2)
Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Banten
2013 – 2020

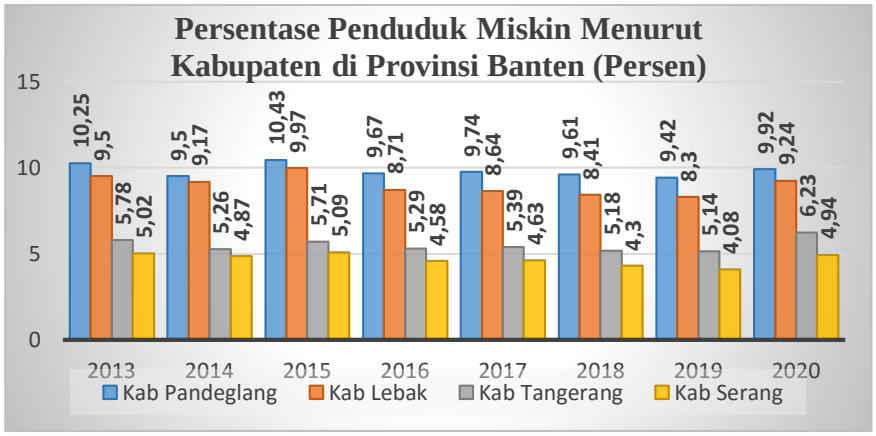

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan grafik tingkat kemiskinan kabupaten di Provinsi Banten 2013 – 2020, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pada tingkat kemiskinan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Kabupaten Pandeglang menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada periode 2013 – 2020 dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,43 %. Kemudian pada tahun 2020 Kabupaten masih menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di periode 2020 di Provinsi Banten yaitu sebesar 9,92 %. Adapun pada tahun 2020 Kabupaten Serang menjadi Kabupaten dengan tingkat

kemiskinan terendah menurut kabupaten di Provinsi Banten sebesar 4,94 %.

Gambar 4.4
Variabel Independen (X2)
Tingkat Kemiskinan Kota di Provinsi Banten 2013 – 2020

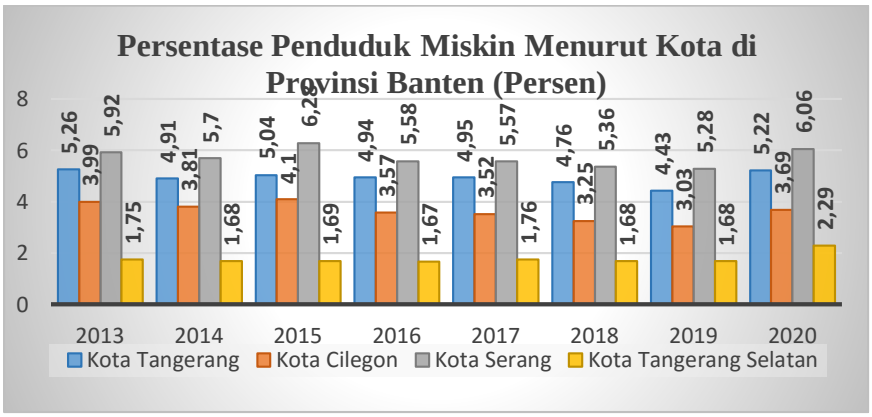

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan grafik tingkat kemiskinan daerah perkotaan Provinsi Banten 2013 – 2020, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pada tingkat kemiskinan di setiap tahunnya. Untuk tingkat kemiskinan kota terendah tahun 2020 yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar 2,29 %. Kemudian di tahun yang sama Kota serang menjadi Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi menurut Kota di Provinsi Banten sebesar 6,06%.

c. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk keperluan konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama sebulan, yang kemudian pengeluaran tersebut dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan berdasarkan pada nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli dalam suatu periode. Adapun data pengeluaran per kapita sebagai berikut:

Gambar 4.5
Variabel Independen (X3)
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten di Provinsi Banten
Tahun 2013 – 2020 (Ribu Rupiah/Tahun)

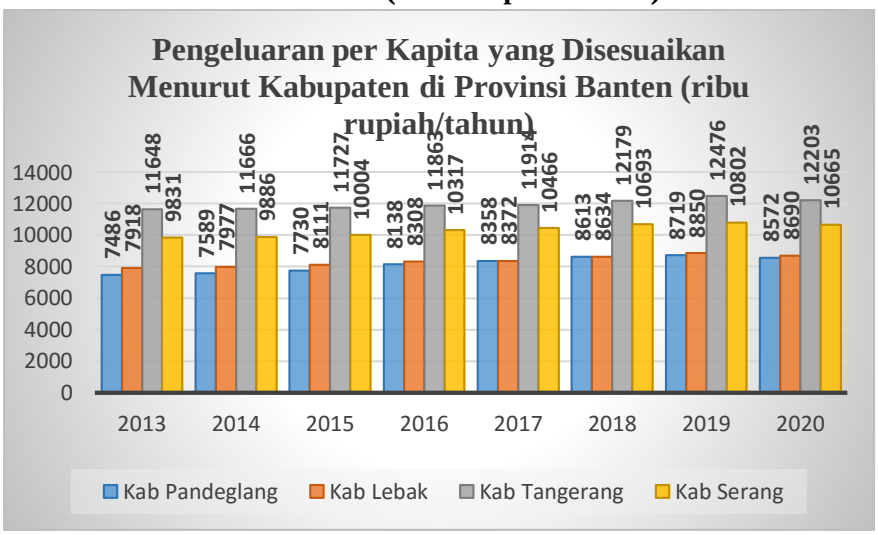

Sumber: BPS Provinsi Banten

Sepanjang tahun 2013 – 2019 pengeluaran per kapita mengalami peningkatan yang mencerminkan terjadi peningkatan daya beli masyarakat disetiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 penurunan pengeluaran per kapita di masing-masing daerah kabupaten di Provinsi Banten. Pada tahun 2020, Kabupaten Pandeglang menjadi kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah di Provins Banten yaitu sebesar Rp 8.572.000,- pengeluaran per kapita ini turun sebesar Rp 147.000,- dari tahun 2019. Pada tahun 2020 Kabupaten Tangerang sebagai kabupaten dengan pengeluaran per kapita tertinggi menurut wilayah kabupaten di Provinsi Banten sebesar Rp 12.203.000,- yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 273.0000,-. Adapun untuk perkembangan pengeluaran per kapita daerah perkotaan dideskripsikan pada grafik berikut:

Gambar 4.6

Variabel Independen (X3)

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten di Provinsi Banten

Tahun 2013 – 2020 (Ribu Rupiah/Tahun)

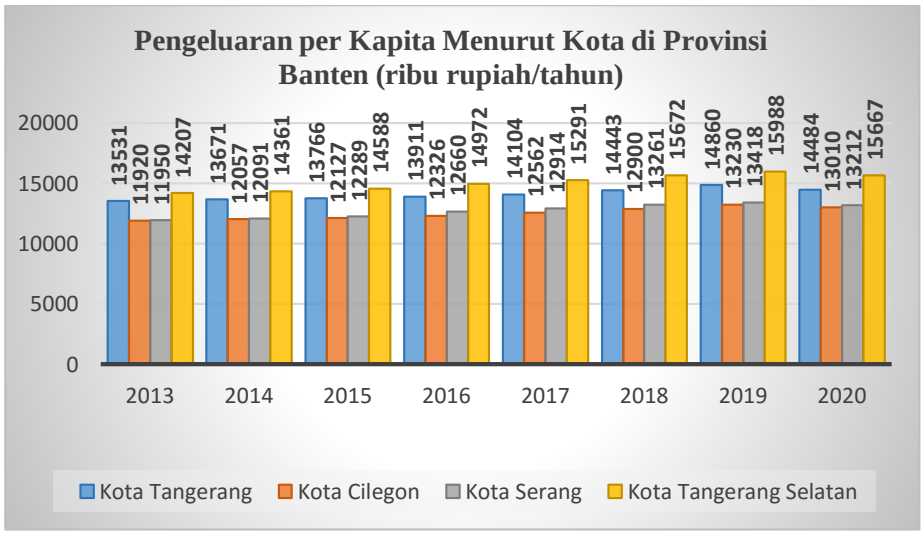

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan data pengeluaran per kapita menurut daerah perkotaan Provinsi Banten, dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi sepanjang tahun 2013 – 2020 pada pengeluaran per kapita. Pada tahun 2013 – 2019 mengalami peningkatan yang mencerminkan terjadi peningkatan daya beli masyarakat disetiap tahunnya. Pada tahun 2020 seluruh daerah kota di Provinsi Banten mengalami penurunan pengeluaran

per kapita, hal ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan masyarakat sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. pengeluaran per kapita tertinggi di tahun 2020 yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 15.667.000,- kemudian diikuti oleh Kota Tangerang dengan pengeluaran per kaputa sebesar Rp 14.484.000,-

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan kesimpulan rata-rata atas keberhasilan dimensi pokok alat ukur pembangunan manusia untuk mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu negara, yaitu umur panjang dan hidup sehat, memiliki pengetahuan dan berkehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak.

Tujuan utama dari pembangunan manusia yaitu memperluas preferensi atau pilihan manusia diantaranya yaitu memperluas pilihan manusia dalam kebebasan berbicara, kebebasan beragama, memiliki keluarga dan lingkungan yang sehat, adanya pesamaan hukum, kebebasan berekspresi, ikut serta dalam

partisipasi politik, terpenuhinya akses teknologi, dan lain sebagainya. Meningkatkan preferensi serta kemampuan bagi manusia dilakukan dengan cara investasi pada diri manusia. Adapun pencapaian IPM kabupaten/kota di Provinsi banten sebagai berikut:

Gambar 4.7

Variabel Dependen (Y)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2013 – 2020

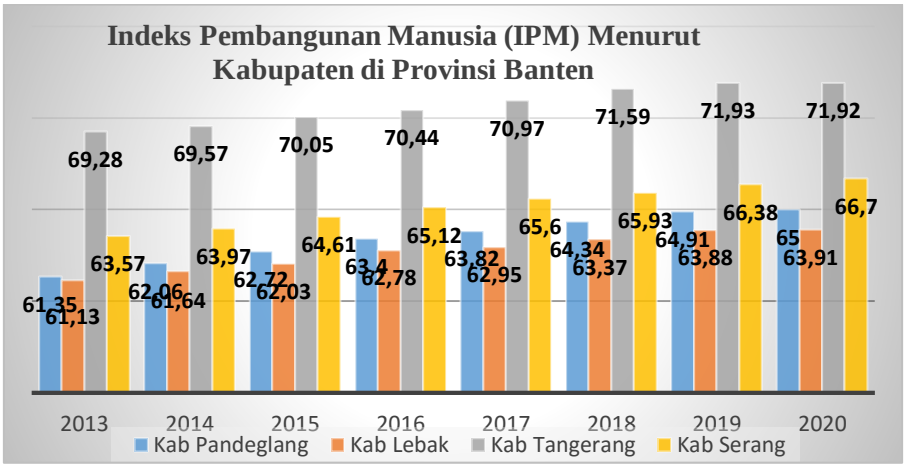

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan grafik perkembangan IPM daerah kabupaten di Provinsi Banten mengalami peningkatan pencapaian pembangunan manusia disetiap tahunnya. Adapun kabupaten yang memiliki IPM terendah di

tahun 2020 yaitu Kabupaten Lebak sebesar 63,91 termasuk pada kategori status pembangunan manusia sedang.

Kemudian ditahun yang sama Kabupaten Tangerang sebagai kabupaten dengan IPM tertinggi menurut daerah kabupaten di Provinsi Banten sebesar 71,92 termasuk pada kategori pembangunan manusia berstatus tinggi. Adapun pencapaian pembangunan daerah perkotaan di Provinsi Banten sebagai berikut:

Gambar 4.8
Variabel dependen (Y)
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Provinsi Banten Tahun 2013 – 2020

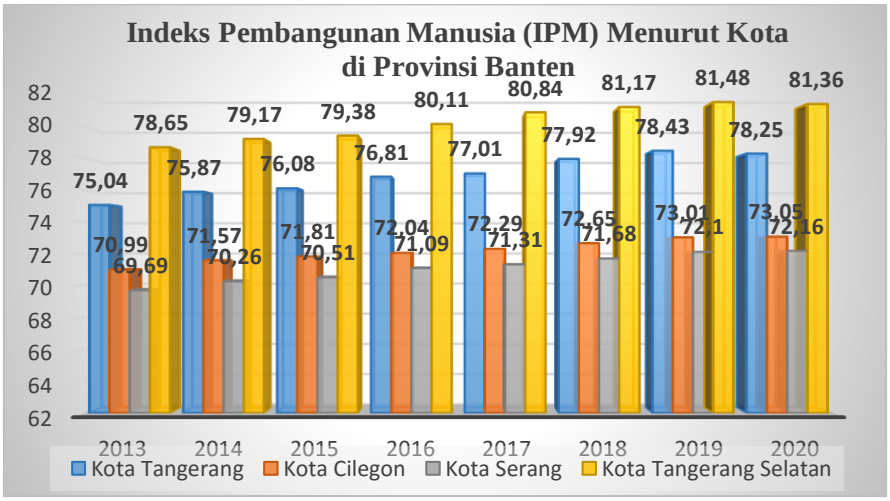

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan grafik IPM di atas, diketahui bahwa IPM kota di Provinsi Banten tahun 2013 – 2020 mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2020 IPM tertinggi diduduki oleh Kota Tangerang Selatan sebesar 81,36, termasuk pada kategori pembangunan manusia berstatus sangat tinggi.

Kemudian Kota Tangerang memiliki angka IPM sebesar 78,25, termasuk pada kategori pembangunan manusia berstatus tinggi. Secara umum IPM di Provinsi Banten termasuk ke dalam klasifikasi status pembangunan manusia yang tinggi $70 \leq IPM < 80$.

4. Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode statistika mengenai pengumpulan serta penyajian data yang berguna untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Statistik deskriptif dapat mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data variabel-variabel. Adapun hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
IPM	70,3234	6,02470	64
IPG	230,2938	1129,87806	64
KEMISKINAN	5,6311	2,52205	64
PENGELUARAN PER KAPITA	11653,88	2423,309	64

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 23

Berdasarkan hasil uji statistif deskriptif dapat diketahui bahwa masing-masing variabel berjumlah 64 data. Variabel IPM (Y) memiliki rata-rata sebesar 70,3234 serta standar deviasi variabel IPM sebesar 6,02470. Variabel IPG (X1) memiliki rata-rata sebesar 230,2938 dan standar deviasi variabel IPG sebesar 1129,87806. Variabel kemiskinan (X2) memiliki rata-rata sebesar 5,6311 dan standar deviasi variabel kemiskinan sebesar 2,52205. Sementara variabel pengeluaran per kapita (X3) memiliki rata-rata sebesar 11653,88, serta berstandar deviasi sebesar 2423,309.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak dengan menguji asumsi normalitas pada suatu residual. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Untuk mengetahui data berdistribusi normal menggunakan analisis grafik, yaitu jika distribusi data residual normal, maka garis yang mengdeskripsikan data akan mengikuti garis diagonalnya. Berdasarkan pengujian uji normalitas menggunakan SPSS 23, maka didapatkan output sebagai berikut:

Gambar 4.9

Hasil Uji Normalitas

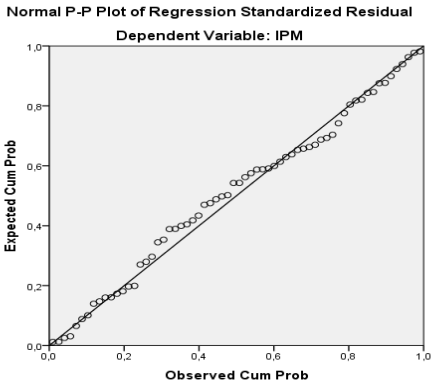

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 23

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa sebaran data berdistribusi normal, dikarenakan titik-titik residual menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Adapun untuk menguji normalitas menggunakan analisis statistik, maka digunakanlah uji *Kolmogorof-Smirnov*.

Tabel 4.2
Uji *Kolmogorof-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,26865459
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,058
	Negative	-,074
Test Statistic		,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 23

Berdasarkan hasil normalitas, dapat diketahui bahwa nilai *Kolmogorof-Smirnov* sebesar 0,074. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari $\propto = 0{,}05$ (0,200 > 0,05). Dengan demikian disimpulkan bahwa data berdistribusi normal serta model regresi memenuhi uji asumsi klasik.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Uji Glejser yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari alpha (Sig > $\propto = 0{,}05$) maka model regresi dipastikan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas diolah menggunakan SPSS 23.

Tabel 4.3
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,421	1,360		1,045	,300
	IPG	,000	,000	-,153	-1,219	,228
	Kemiskinan	-,063	,079	-,201	-,802	,426
	Pengeluaran Per Kapita	-4,897E-6	,000	-,015	-,060	,953
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 23

Berdasarkan output uji heteroskedastisitas, dapat diketahui bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi Sig $> \propto = 0{,}05$. Nilai signifikansi IPG (X1) terhadap ABS RES sebesar 0,228 > 0,05, nilai signifikansi kemiskinan (X2) terhadap ABS RES sebesar 0,426 > 0,05 dan nilai signifikansi pengeluaran perkapita (X3) terhadap ABS RES sebesar 0,953 > 0,05.

3) Uji Autokorelasi

Autokolerasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi antar observasi dalam satu variabel,

autokorelasi terjadi karena data *time series* atau rentang waktu. Tujuan dari uji autokorelasi yaitu menguji apakah terdapat korelasi dalam model regresi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson*. Hasil uji autokorelasi menggunakan SPSS 23 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,978[a]	,956	,953	1,29998	,434

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Per Kapita, IPG, Kemiskinan
b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 23

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, dapat diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 0,434. Nilai DW ini akan dibandingkan dengan nilai pada tabel *Durbin Watson* dengan signifikansi 5 %, jumlah

sampel (n) 64 serta jumlah variabel independen (K = 3), sehingga didapat nilai dL = 1,4990 dan nilai dU = 1,6946.

Gambar 4.10

Uji Autokorelasi

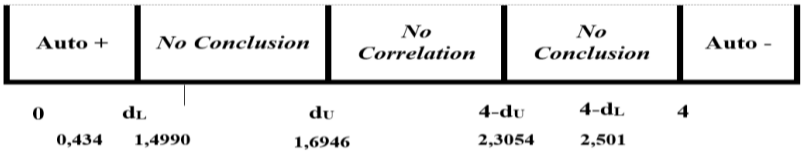

Berdasarkan gambar uji autokorelasi, nilai DW 0,434 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari nilai d_L 1,4990 atau $0 < d < d_L$, maka disimpulkan terjadi autokorelasi positif.

Hasil uji tersebut menyatakan terjadi problem autokorelasi, maka untuk mengatasi problem autokorelasi dapat menggunakan transformasi.

Tabel 4.5

Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,947[a]	,896	,891	,77571	1,812
a. Predictors: (Constant), LAG_X3, LAG_X1, LAG_X2					
b. Dependent Variable: LAG_Y					

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 23

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat dilihat nilai *Durbin Watson* sebesar 1,812. Nilai DW dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5 %, jumlah sampel (n) 64 dan jumlah variabel independen (k = 3). Sehingga didapat nilai dL = 1,4990 dan nilai dU = 1,6946. Berikut gambar pengambilan keputusan uji autokorelasi seteah transformasi:

Gambar 4.11

Uji Autokorelasi (Lag)

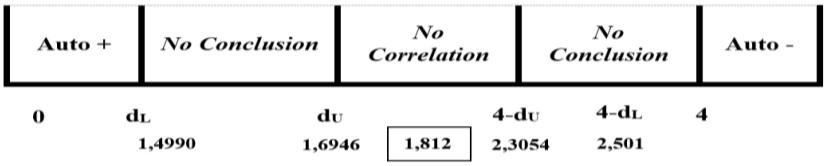

Berdasarkan gambar autokorelasi (lag), diketahui DW sebesar 1,812 lebih besar dari d_U 1,6946 dan lebih kecil dari nilai 4 – d_U sebesar 2,3054 atau $d_U < d < 4 - d_U$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dengan keputusan terima H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi.

4) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi apakah terdapat kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang diharapkan dan dapat dikatakan baik jika tidak terdapat korelasi antara variabel-variabel bebasnya. Mengetahui adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	IPG	,997	1,003
	Kemiskinan	,249	4,019
	Pengeluaran Per Kapita	,249	4,020
a. Dependent Variable: IPM			

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 23

Hasil uji multikolinearitas yang diperoleh bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10, yaitu IPG sebesar 1,003; kemiskinan sebesar 4,019; pengeluaran per kapita sebesar 4,020.

Kemudian nilai *tolerance* seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,10. Berdasarkan nilai VIF pada seluruh variabel penelitian kurang dari 10 dan nilai *tolerance* semua variabel lebih besar dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data seluruh variabel penelitian tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil regresi linier berganda menggunakan program SPSS 23, didapatkan koefisien regresi yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Output Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37,103	2,249		16,499	,000
	IPG	,000	,000	-,032	-1,184	,241
	Kemiskinan	,309	,130	,130	2,376	,021
	Pengeluaran Per Kapita	,003	,000	1,088	19,957	,000
a. Dependent Variable: IPM						

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 23

Berdasarkan hasil regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e}$

Y = 37,103 + 0,000(X1) + 0,309(X2) + 0,003(X3) + e

Berdasarkan fungsi persamaan regresi linier berganda, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1) Nilai konstanta (a) sebesar 37,103 menyatakan bahwa, ketika Indeks Pembangunan Gender (IPG), tingkat kemiskinan dan pengeluaran perkapita sama dengan 0, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 37,103.
2) Koefisien regresi X_1 (IPG) sebesar 0,000 menyatakan bahwa kenaikan 1 tahun Indeks Pembangunan Gender akan menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,000 atau dapat dikatakan IPG tidak menyebabkan peningkatan angka IPM.
3) Koefisien regresi X_2 (tingkat kemiskinan) sebesar 0,309 artinya jika kemiskinan mengalami

peningkatan satu kali akan menyebabkan peningkatan IPM sebesar 0,309 jika variabel bebas lainnya konstan.

4) Koefisien regresi X_3 (pengeluaran per kapita) sebesar 0,003 artinya jika pengeluaran perkapita naik sebesar satu rupiah, maka menyebabkan kenaikan pada Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,003 jika variabel bebas lainnya konstan. Koefisien regresi positif, maka semakin besar pengeluaran per kapita maka angka IPM yang diperoleh semakin meningkat.

d. Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis secara parsial (Uji t) dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sehingga dapat diketahui variabel independen memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak.

Tabel 4.8

Uji Parsial (Uji – t)

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	37,103	2,249		16,499	,000
IPG	,000	,000	-,032	-1,184	,241
Kemiskinan	,309	,130	,130	2,376	,021
Pengeluaran Per Kapita	,003	,000	1,088	19,957	,000

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 23

Dalam melakukan uji hipotesis secara parsial perlu dipahami dasar pengambilan keputusan dari hasil uji statistik – t, yaitu:

a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan signifikansi t $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan terima H_1. Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi t $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima dan tolak H_1. Hal ini berarti bahwa

secara parsial variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Uji – t pada variabel independen IPG (X_1), diketahui t_{hitung} sebesar -1,184 sedangkan t_{tabel} dengan menggunakan uji dua arah serta signifikansi 5 % df (n-k-1) = (64-3-1) = 60. Sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,000. Oleh karena itu nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1,184 < 2,000) dan tingkat signifikansi 0,241 atau lebih besar dari 0,05 (0,241 > 0,05). Dengan demikian keputusan yang diambil yaitu H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel Indeks Pembangunan Gender (X_1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Uji – t pada variabel independen tingkat kemiskinan (X_2), diketahui t_{hitung} sebesar 2,376 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,000. Oleh karena itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,376 > 2,000) dan tingkat

signifikansi 0,021 atau lebih kecil dari 0,05 (0,021 < 0,05). Dengan demikian keputusan yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti secara parsial variabel tingkat kemiskinan (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Uji – t pada variabel independen pengeluaran per kapita (X_3), diketahui t_{hitung} sebesar 19,957 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,000. Oleh karena itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (19,957 > 2,000) dan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05). Dengan demikian keputusan yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti secara parsial variabel pengeluaran per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y).

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik simultan (Uji F) berfungsi untuk menunjukkan apakah semua variabel

independen (X_1, X_2, X_3) pada model regresi berganda berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Hasil Uji F dikatakan cocok atau *fit*, Jika hasil dari Uji F variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9

Uji Simultan (Uji – F)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2185,312	3	728,437	431,039	,000[b]
	Residual	101,398	60	1,690		
	Total	2286,710	63			
a. Dependent Variable: IPM						
b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Per Kapita, IPG, Kemiskinan						

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 23

Berdasarkan hasil olah regresi linier berganda, diketahui nilai Fhitung sebesar 431,039 sedangkan Ftabel df a, (K – 1), (n –K) = df 0,05, (2), (61) sehingga diperoleh Ftabel sebesar 3,15. Oleh karena itu nilai $F_{hitung} > t_{tabel}$ (431,039 > 3,15) dan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian keputusan

yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti secara simultan variabel Indeks Pembangunan Gender (X_1), tingkat kemiskinan (X_2) dan pengeluaran per kapita (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y).

e. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah angka yang menginterpretasikan kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Angka yang dihasilkan koefisien korelasi menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, nilai korelasi (r) = ($-1 \leq 0 \leq 1$). Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan SPSS 23 sebagai berikut:

Tabel 4.10

Uji Koefisien Korelasi

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,978[a]	,956	,953	1,29998
a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Per Kapita, IPG, Kemiskinan				
b. Dependent Variable: IPM				

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 23

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,978 yang terletak pada interval 0,80 – 0,100 yang berarti tingkat hubungan antara Indeks Pembangunan Gender (IPG), tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sangat kuat.

f. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menginterpretasikan baik tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai koefisien determinasi juga dapat menginformasikan nilai R^2 tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah dengan garis regrsi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat jelaskan oleh variabel bebas X.

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,978[a]	,956	,953	1,29998
a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Per Kapita, IPG, Kemiskinan				
b. Dependent Variable: IPM				

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 23

Berdasarkan tabel koefisien determinasi (R^2) di atas, diketahui nilai (R^2) sebesar 0,956 = 95,6 %. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG), tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapitadapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 95,6 % dan sisanya sebesar 4,4 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten

Hasil penelitian kuantitatif analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23, menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Hal ini dijelaskan dengan hasil analisis data secara parsial (Uji – t) yaitu nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1,184 < 2,000) dan tingkat signifikansi 0,241 atau lebih besar dari 0,05 (0,241 > 0,05).

Dengan demikian keputusan yang diambil yaitu H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.

Teori *nature* sebagai teori gender yang menjelaskan bahwa gender sebagai kodrat alam yang tidak patut dipertentangkan. Perbedaan sudut pandang biologis antara perempuan dan laki-laki sebagai ketetapan Tuhan yang kemudian menjadi penentuan peranan maupun tanggung jawab keduanya.[7] Kaum laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga dan bekerja di lingkungan publik untuk mencari nafkah. Sedangkan kaum perempuan memiliki peran sebagai ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui, dengan demikian perempuan berperan dalam ranah domestik yang bertanggung jawab penuh menjaga dan mendidik anak serta mengurus rumah tangga. Perbedaan ini dalam teori *nature* sebagai anugrah Tuhan

[7] Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, h. 18.

dan perbedaan ini bukanlah bentuk diskriminasi peranan ataupun tanggungjawab.[8]

Uji data secara parsial yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia (t_{hitung} (1,184) < t_{tabel} (2,000) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Puspita Sari, Sudati Nur Safiah dan Lucia Rita Indrawati dengan judul "Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011 – 2017 (Studi Kasus 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah) menerangkan bahwa pembangunan gender sebagai indikator yang berperan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang dipengaruhi oleh ketimpangan pendidikan, kesehatan maupun ketenagakerjaan. Adapun

[8] Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, h. 72.

kesesuaian penelitian ini dengan penelitian pembanding yaitu fungsi dari IPG dan IPM adalah mengukur keberhasilan pembangunan, kedua indeks ini saling berhubungan namun bukan sebagai faktor yang saling mempengaruhi. Indeks Pembangunan Gender pada dasarnya berfungsi sama dengan Indeks Pembangunan Manusia yaitu untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia, hanya saja IPG berfokus pada pembangunan gender.

Tidak adanya pengaruh antara Indeks Pembangunan Gender dengan Indeks Pembangunan Manusia sesuai dengan hasil penelitian Uswatun Hasanah dan Ikhsan dengan judul “Pembangunan Manusia, Ketimpangan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi”, dengan hasil penelitian angka harapan hidup berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi

angkatan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.[9]

Kesesuaian penelitian ini dengan penelitian pembanding yaitu menerangkan bahwa IPG dan IPM memiliki faktor-faktor pembangun yang sama yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, umur harapan hidup dan pengeluaran perkapita. Faktor-faktor ini menunjukkan pencapaian pembangunan manusia secara keseluruhan dan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender. Sehingga IPG bukanlah faktor pembentuk pencapaian IPM, namun IPG dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gender merupakan perbedaan peranan, tanggung jawab serta fungsi antara laki-laki dan perempuan yang bukan ditetapkan oleh perbedaan biologis sebagai ketetapan Tuhan, namun ditetapkan oleh lingkungan sosial budaya, ekonomi dan politik yang dapat mengalami

[9] Hasanah dan Ikhsan, "Pembangunan Manusia, Ketimpangan dan pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," h. 52.

perubahan. Perbedaan peranan ini pada dasarnya bukan suatu masalah yang berarti jika tidak menimbulkan ketidakadilan yang merugikan. Namun pada dasarnya perbedaan ini dapat memicu masalah ketidakadilan atau pun ketidaksetaraan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan hingga beban kerja berlebih yang ditanggung perempuan.

Kaum perempuan dalam pandangan para ilmuan pembangunan sebagai kaum penting yang berperan dalam proses pembangunan. Kenyataan yang terjadi ialah kaum perempuan mendapatkan berbagai kesulitan dalam mencapai kelayakan hidupnya dikarenakan sulitnya mendapat akses utama seperti pendidikan, kesehatan dan berbagai kebebasan hak.

Todaro berpandangan bahwa kaum perempuan memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan terputus atau tidaknya siklus pewarisan kemiskinan ataupun keterbelakangan yang dialami generasi ke generasi

berikutnya.[10] Sehingga kaum perempuan dapat menciptakan generasi unggul, karena kaum ibu berperan untuk meneruskan norma-norma penting dalam kehidupan anak – anak mereka. Pendidikan dasar dan kasih sayang yang dilakukan seorang ibu berdampak kepada keberhasilan pembangunan manusia dan negara secara keseluruhan.

Berdasarkan teori *equlibrium* gender, yang berpendapat bahwa ditengah perbedaan yang dimiliki, kaum laki-laki dan perempuan harus tetap bersinergi dan bekerja sama dalam keharmonisan relasi gender baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungan negara tanpa mempertentangkan relasi antar keduanya.[11] Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia (t_{hitung} (1,184) < t_{tabel} (2,000) bukan berarti Indeks Pembangunan Gender tidak memiliki peran terhadap Indeks

[10] Todaro dan Smith, *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi 10*, h. 27.
[11] Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, ..., h. 21.

Pembangunan Manusia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa meskipun IPG dengan IPM tidak memiliki pengaruh, namun kedua indeks tersebut saling memiliki hubungan untuk mengetahui adanya ketimpangan atau kesetaraan gender di suatu wilayah maupun negara dengan memperbandingkan angka IPG dengan IPM.

Pembangunan gender bertujuan untuk saling memahami kepentingan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang dan saling melengkapi baik dari kelebihan maupun kekurangan untuk mendukung penerapan potensi-potensi yang dimiliki. Perbedaan peranan berdasarkan jenis kelamin menimbulkan perbedaan perlakukan berdasarkan gender, kaum perempuan dibentuk sebagai makhluk irrasional, emosional dan lemah lembut dan kaum laki-laki dipandang sebagai makhluk yang rasional dan kuat. Perbedaan perlakuan atau cara pandang tersebut bukanlah masalah jika tidak menimbulkan berbagai masalah seperti diskriminasi yang dapat menimbulkan kerugian dikedua belah pihak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Miftha'ul Hidayah dan Farida Rahmawati dengan judul "Menelusur Relasi Indikator Indeks Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi" yang menerangkan bahwa hubungan antara IPG dengan IPM yaitu sebagai indeks yang dapat mengukur ketimpangan gender. Hasil penelitian yaitu penurunan ketimpangan gender dalam aspek kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.[12]

Penelitian ini menerangkan adanya hubungan antara IPG dengan IPM sebagai indeks yang dapat mengukur ketimpangan gender. Jika angka IPM lebih besar dari IPG maka terjadi ketimpangan gender dan jika angka IPM sama dengan IPG maka berarti tidak terjadi ketimpangan gender. Sehingga IPG bukan faktor yang

[12] Rahmawati dan Hidayah, "Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," h. 125.

mempengaruhi peningkatan IPM, namun berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

IPG dan IPM adalah indeks komposit yang dibentuk oleh *United Nations Developmen Program* (UNDP). IPG dan IPM saling berhubungan yang berfungsi untuk mengukur pencapaian atau keberhasilan pembangunan manusia. Ketimpangan gender dapat diketahui jika angka IPM lebih besar dari IPG. Ketimpangan gender akan semakin meningkat jika angka IPG semakin besar jaraknya dengan nilai 100 yang mengindikasikan bahwa terjadi ketidaksetaraan dalam pencapaian pembangunan kapabilitas ataupun kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Pembangunan gender di Provinsi Banten tercermin dari angka IPG yang tumbuh seiring dengan meningkatnya angka IPM. Ini berarti telah terjadi penurunan perbedaan perlakuan pada perempuan pembangunan berbasis manusia berhasil tercapai. Namun, capaian pembangunan gender belum merata pada setiap daerah di Provinsi Banten. Kondisi ketimpangan gender

yang dipengaruhi oleh kondisi geografis hingga potensi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda.

Indeks pembangunan gender mengukur pencapaian pembangunan laki-laki dan perempuan berdasarkan rasio dari Indeks Pembangunan Manusia laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia perempuan sehingga dapat diketahui implikasinya. Capaian pembangunan yang dilakukan oleh perempuan dilihat pada perbedaan perlakuan terhadap perempuan baik pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sehingga capaian pembangunan manusia secara keseluruhan diinterpretasikan oleh IPM, dan capaian pembangunan manusia berbasis gender diinterpretasikan oleh IPG.

Amartya Sen berpandangan bahwa perempuan perlu diperlakukan dengan baik dari segi perbaikan peningkatan kesejahteraan maupun kebebasan yang dimiliki perempuan.[13] Memperlakukan perempuan dengan baik bertujuan untuk membentuk perempuan yang

[13] Sen, *Development as Freedom*, h. 189.

berperan aktif sebagai agen perubahan dan sebagai promotor yang dinamis dalam transformasi sosial yang terjadi di masyarakat sehingga berdampak pada pemulihan kehidupan laki-laki maupun perempuan menjadi lebih baik. Amartya Sen pun melihat bahwa penghormatan ataupun penghargaan terhadap kaum perempuan dipengaruhi oleh berbagai kapabilitas yang dimiliki perempuan dalam memperoleh penghasilan secara mandiri, peran ekonomi di luar keluarga, berhak atas suatu kepemilikan harta, perempuan dengan pendidikan yang baik dan berkualitas dan perempuan ikut berperan dalam pengambilan keputusan di dalam maupun di luar keluarga.

Kapabilitas yang dimiliki setiap perempuan pasti berbeda, sehingga pandangan hidup antar perempuan pun berbeda. Di tengah perbedaan tersebut kemaampuan perempuan diharapkan mampu berkontribusi positif dalam memperkuat identitas perempuan melalui kemandirian dan pemberdayaan yang dimiliki. Seorang perempuan yang ikut mencari nafkah secara mandiri guna memenuhi

kebutuhan hidup keluarganya akan berdampak pada peningkatan status sosial ekonomi perempuan tersebut di daam keluarga maupun masyarakat.

Landaskan pendidikan mampu menjadikan perempuan lebih terampil dan berpengetahuan. Pemberdayaan terpadu dilakukan untuk memfasilitasi perempuan dalam meningkatkan kemampuan atas potensi yang dimiliki serta diiringi pengakuan atas kemampuan, kemandirian serta emansipasi perempuan yang berpengaruh pada kekuatan membangun kehidupan manusia yang layak dari berbagai aspek kehidupan.

2. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten

Hasil penelitian kuantitatif analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23, menunjukkan bahwa secara parsial variabel tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Hal ini diketahui berdasarkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,376 > 2,000)

dan tingkat signifikansi 0,021 atau lebih kecil dari 0,05 (0,021 < 0,05). Dengan demikian keputusan yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.

Shirazi dan Pramanik berpandangan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dihadapi oleh seseorang yang tidak memiliki kecukupan sumber daya demi memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, yang dilihat dari segi ekonomi, sosial, psikologi maupun spiritual.[14] Sumber daya manusia sebagai modal terpenting pembangunan ekonomi suatu negara. Kemampuan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki menjadikan negara tumbuh dan mencapai kesejahteraan. Karena keberhasilan dari pembangunan suatu negara merupakan refleksi dari keberhasilan manusia.

Penelitian Jahtu Widya Ningrum, Azizah Hanifa Khairunnisa dan Nurul Huda dengan judul penelitian

[14] Beik dan Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, h. 68.

"Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014 – 2018 dalam Perspektif Islam". Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.[15] Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil uji data secara parsial yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten (t_{hitung} (2,376) > t_{tabel} (2,000) dan tingkat signifikansi (0,021 < 0,05)). Kemiskinan menjadi penyebab disparitas dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Sesuai dengan *human capital theory*, bagi Todaro manusia adalah modal dalam membangun suatu negara, pengukuran *human capital* dapat dihitung atau diukur melalui aspek pendidikan dan kesehatan yang berjalan

[15] Ningrum, Khairunnisa, dan Huda, "Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014 - 2018 dalam Perspektif Islam," h. 219.

beriringan. Berpengaruh secara signifikannya tingkat kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Banten (t_{hitung} (2,376) > t_{tabel} (2,000) dan tingkat signifikansi (0,021 < 0,05)), menjelaskan bahwa kemiskinan menyebabkan terhambatnya seseorang mendapatkan taraf pendidikan, kesehatan, dan juga kemiskinan melatarbelakangi rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Proses pendidikan dan pelatihan dapat menambah nilai potensial diri sehingga memacu pertambahan produktivitas. Keahlian dan keterampilan juga akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kesehatan dan pendidikan juga mampu mengatasi masalah kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan yang memicu pada sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga menimbulkan keterisolasian.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Sari Dewi, Wiwin Priana

Primandhana dan Mohammad Wahed dengan judul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro", dengan hasil penelitian menunjukkan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro.[16] Perlu diketahui tingkat kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2020 sebesar 5,92 % atau sebanyak 776.000 penduduk di Provinsi Banten berada dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan yang dialami masyarakat berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan manusia, hal ini ditandai dengan jika terjadi kenaikan angka kemiskinan (diasumsikan faktor lainnya konstan) maka akan diiringi penurunan IPM. Kesulitan manusia memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan akibat kemiskinan

[16] Dewi, Primandhana, dan Wahed, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro," h. 843.

akan berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat.

Berpengaruh secara signifikannya tingkat kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Banten (t_{hitung} (2,376) > t_{tabel} (2,000) dan tingkat signifikansi (0,021 < 0,05)) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winsy A. Tarumingkeng, Vekie A. Rumate dan Tri Oldy Rotinsulu dengan judul "Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara". Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.[17] Kondisi ketidakmampuan memenuhi standar kualitas hidup masyarakat juga dapat dilatarbelakangi oleh rendahnya pendapatan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dasar.

[17] Tarumingkeng, Rumate, dan Rotinsulu, "Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara," h. 92.

Meire dan Baldwin berpandangan bahwa lingkaran kemiskinan dilatarbelakangi oleh adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara keterbelakangan masyarakat yang biasa terjadi pada masyarakat tradisional dan kekayaan SDA yang belum diberdayakan secara optimal.[18] Pandangan Maire dan Baldwin ini sesuai jika direfleksikan pada kondisi kemiskinan di Provinsi Banten yang memiliki penduduk miskin di pedesaan sebesar 8,18 % lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan sebesar 5,03 %. Kondisi masyarakat pedesaan dapat dikatakan belum mampu mengoptimalkan SDA yang dimiliki dapat disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja yang terampil dan dapat memimpin sekaligus melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi. Lingkaran kemiskinan belum dapat terputus jika masih terdapat faktor penghambat pembangunan, seperti rendahnya tingkat tabungan, pembentukan modal, pendidikan dan keahlian masyarakat.

[18] Arsyad, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kelima*, h. 112.

Menurut Scultz, modal manusia menjadi bagian kualitatif dari sumber daya manusia, yang akan berhubungan dengan kemampuan produktivitas manusia.[19] Potensi diri yang terkandung dalam diri manusia seperti pengetahuan, kapabilitas serta keterampilan dikembangkan melalui proses pendidikan formal maupun non formal disertai dengan upaya menjaga kesehatan fisik maupun mental.

Permasalahan kemiskinan diatasi dengan perbaikan kualitas diri manusia. Sesuai dengan *human investment theory* yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan manusia, baik itu kecerdasan interpersonal maupun kecerdasan intrapersonal. Investasi manusia juga dapat meningkatkan kecerdasan-kecerdasan lainnya yang terkadang belum disadari seseorang. Indeks Pembangunan Manusia yang dibentuk oleh *United Nations Developmen Program* dengan tujuan mengukur pencapaian kapabilitas manusia yang dilihat dari pencapaian pembangunan sosio-

[19] Farah dan Sari, "Modal Manusia Dan Produktivitas," h. 23.

ekonomi suatu negara. Peningkatan preferensi manusia dapat mengatasi kemiskinan dengan perbaikan pada 3 hal yaitu menempuh kehidupan yang sehat dengan jangka waktu yang relatif lama, mempunyai pengetahuan, pekerjaan dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan standar kelayakan hidup.

Perbaikan kualitas hidup ini dilakukan secara berkelanjutan disertai berbagai kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk menyalurkan bantuan sosial dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah juga berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bantuan sosial dari pemerintah berupa pangan nontunai yang diperuntukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan program pendidikan (Kartu Indonesia Pintar), serta Program keluarga harapan sebagai program jaminan perlindungan sosial bagi keluarga miskin.

3. Pengaruh Pengeluaran Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten

Hasil penelitian kuantitatif analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23, menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Hal ini diketahui berdasarkan t_{hitung} sebesar 19,957 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,000. Oleh karena itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (19,957 > 2,000) dan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05). Maka keputusan yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya pengeluaran per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.

Pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Banten (nilai t_{hitung} (19,957) > t_{tabel} (2,000)) sejalan dengan penelitian A Jauhar Mahya dan Widowati yang berjudul "Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita

terhadap Indeks Pembangunan Manusia", dengan hasil penelitian yaitu pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia.[20] Penelitian ini menjelaskan bahwa pengeluaran perkapita menjadi salah satu dari indikator pengukuran Indeks Pembangunan Manusia yang berada pada dimensi standar hidup layak.

Menurut Badan Pusat Statistik Pengeluaran per kapita yaitu pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk keperluan konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama sebulan, yang kemudian pengeluaran tersebut dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.[21] pengeluaran per kapita dapat mencerminkan daya beli masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rahardja dan Manurung memandang pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang pengeluaran

---

[20] Mahya dan Widowati, "Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah , Rata-Rata Lama Sekolah , dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia," h. 126.

[21] Statistik, *Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Provinsi Banten 2019*, h. 8.

terbesar total pengeluaran secara agregat.[22] Sehingga berpengaruh besar terhadap stabilitas perekonomian negara. Diketahui persentase pengeluaran perkapita Provinsi Banten Maret 2020 untuk pengeluaran makanan sebesar 49,88 % dan pengeluaran non makanan sebesar 50,12 %. Perkembangan konsumsi masyarakat relatif cepat menyebabkan perilaku konsumsi masyarakat cepat mengalami perubahan. Seperti pola perilaku konsumsi masyarakat perkotaan lebih memprioritaskan pengeluarannya untuk memenuhi konsumsi non makanan sebesar 52,38 %. Adapun perbedaan gaya hidup lebih kontras jika dibandingkan perilaku konsumsi masyarakat pedesaan di Provinsi Banten yang lebih memprioritaskan pengeluarannya untuk konsumsi makanan sebesar 59,11 %.[23] Sehingga perkembangan konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat maka jika pendapatan masyarakat

---

[22] Rahardja dan Mandala Manurung, *Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi Dan Makroekonomi) Edisi Ketiga*, ..., h. 257.

[23] Statistik, *Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Provinsi Banten 2020*, h. 15.

naik, maka pengeluaran konsumsi masyarakat pun akan bertambah.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah Permana yang berjudul "Pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Periode 2012 – 2016", dengan hasil penelitian pengeluaran per kapita berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.[24] Sejalan dengan hasil penelitian bahwa pengeluaran per kapita dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ataupun kondisi ketimpangan yang dialami masyarakat sebagai salah satu indikator dari standar hidup layak IPM.

Sesuai dengan teori konsumsi Keynes bahwa pendapatan disposabel dapat mempengaruhi tingkat konsumsi saat ini, yaitu pengeluaran konsumsi akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan.[25] Pola pengeluaran per kapita penduduk dipengaruhi

---

[24] Permana, Rustamunadi, dan Sunardi, "Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Periode 2012 - 2016," h. 18.

[25] Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, ..., h. 42.

pendapatan dan kebutuhan hidup masyarakat baik untuk makanan maupun non makanan, sehingga pola pengeluaran per kapita berbeda. Pengeluaran per kapita disetiap daerah itu beragam, seperti Kabupaten Lebak tercatat sebagai kabupaten dengan pengeluaran konsumsi untuk makanan terbesar di Provinsi Banten di tahun 2020 yaitu sebesar 58,87%. Pengeluaran per kapita didominasi untuk pengeluaran makanan, ini mencerminkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk. Adapun semakin kecil pengeluaran per kapita untuk konsumsi bukan makanan, ini mencerminkan semakin sejahtera penduduknya. Seperti Tangerang Selatan yang letak kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta sehingga pola perilaku konsumsinya dipengaruhi oleh pola perilaku ekonomi di Jakarta, dengan pengeluaran per kapita untuk makanan terkecil di wilayah Provinsi Banten yaitu sebesar 39, 56 %. Dengan demikian Kota Tangerang Selatan sebagai kota yang dipandang paling sejahtera di Provinsi Banten berdasarkan pengeluaran per kapita.

Penduduk yang berpenghasilan kecil memprioritaskan memenuhi kebutuhan pokok hariannya seperti makanan. Adapun penduduk berpendapatan tinggi akan membentuk pola pengeluaran yang memprioritaskan kebutuhan kebutuhan sekunder bahkan tersier. Sehingga pengeluaran per kapita dapat mengukur standar kelayakan hidup masyarakat. Pengeluaran per kapita juga tercermin dalam teori konsumsi pendapatan relatif James S. Duesenberry yang berpandangan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan untuk meningkatkan konsumsi ketika terjadi peningkatan pendapatan, serta mengurangi proporsi tabungannya ketika terjadi pengurangan pendapatan untuk tetap mempertahankan kegiatan konsumsinya.[26]

Dengan demikian pola pengeluaran sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk, sehingga jika terjadi pergeseran pola

[26] Persaulian, Aimon, dan Anis, "Analisis Konsumsi Masyarakat di Indonesia," h. 18.

pengeluaran konsumsi penduduk maka menandakan terjadi perubahan pada kesejahteraan penduduk. Pengeluaran per kapita sebagia indikator mengukur dimensi standar hidup layak dari Indeks Pembangunan Manusia dengan berdasarkan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli, dengan rata-rata pengeluaran per kapita setahun yang diperoleh dari Susenas.

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten

Hasil penelitian analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23, menunjukkan bahwa secara simultan variabel Indeks Pembangunan Gender, tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten periode tahun 2013 - 2020. Hasil ini diketahui berdasarkan nilai $F_{hitung} > t_{tabel}$ (431,039 > 3,15) dan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian

keputusan yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti Indeks Pembangunan Gender, tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.

Hubungan antara Indeks Pembangunan Gender (IPG), tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten periode tahun 2013 - 2020 adalah sangat kuat berdasarkan hasil uji data yang menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,978 dan memiliki pengaruh secara simultan sebesar 95,6 % sisanya sebesar 4,4 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor pengangguran, gini rasio, pertumbuhan ekonomi, rasio ketergantungan, pendapatan asli daerah, inflasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lainnya.

5. Gender, Kemiskinan, Pengeluaran Per Kapita dan Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Gender dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam sebagai ajaran yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun moralitas manusia dan ketidakadilan yang terjadi. Islam memandang perempuan sebagai karunia dari Allah Swt. Rasulullah Saw mengajarkan prinsip persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, tidak ada diskriminasi dan marginalitas antara keduanya seperti yang terjadi pada jaman *jahiliyah.*

Islam menjamin hak atas agama, harta, akal, kehormatan serta jiwa baik laki-laki maupun perempuan untuk dilindungi. Al-Qur'an menjamin bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk beribadah serta meraih pahala, seperti firman Allah Swt sebagai berikut:

وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا ١٢٤

Artinya:

> *"Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun."* (QS. An-Nisa [4]: 124)[27]

Kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki berkaitan dengan kesamaan hak dan kewajiban. Meskipun pada dasarnya ada beberapa hal yang tidak perempuan dapat lakukan dan sebaliknya. Memang terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun semua itu bukan bagian dari tindakan ketidakadilan yang merugikan. Terlepas dari itu semua, yang membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan yaitu tingkat ketakwaan terhadap Allah Swt.

---

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...*, h. 98.

Gender dalam perspektif hukum islam menerangkan bahwa hukum Islam memang mengenal adanya perbedaan gender untuk membedakan dalam pelaksanaan ibadah maupun dalam pembagian hak waris. Namun, perspektif ekonomi islam tidak mengenal ada perbedaan gender, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam menjalani aktivitas ekonomi. Adapun dalam konsep kerja memang laki-laki diberikan prioritas, dikarenakan sifat alamiah laki-laki yang lebih kuat daripada perempuan. Terdapatnya perbedaan peran dalam kegiatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan dapat disebabkan oleh karakteristik budaya di suatu wilayah.[28]

Gender dalam konsep Ekonomi Islam memperbolehkan seorang perempuan melakukan aktivitas ekonomi seperti bekerja untuk

[28] Dr. Sulaeman Jajuli, M. Ei, Wawancara, 28 September 2021.

memperoleh pendapatan dengan tetap memperhatikan ajaran Islam dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, seperti norma agama, hukum, kesusilaan, dan sosial. Peran perempuan bersifat multidimensi, menjadikan perempuan ikut terlibat dan berperan sebagai istri, ibu, pendidik hingga bekerja untuk memperoleh pendapatan. Sehingga perempuan harus dijaga dengan merefleksikan aturan agama diiringi norma-norma yang berlaku.[29]

Pembangunan gender dalam ekonomi Islam tercermin atas sinergi antara kaum laki-laki dan perempuan dalam menegakkan *amar ma'ruf nahyi munkar* di lingkungan masyarakat hingga negara secara keseluruhan. Pembangunan kesetaraan hak yang diberikan Islam direfleksikan pada kesetaraan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam hak – hak ekonomi seperti hak kepemilikan,

[29] Dr. Syihabudin, M.SI, Wawancara, 7 Oktober 2021

dapat bekerja, hak memperoleh pendapatan, mengklaim hak waris, mampu mandiri dan diperlakukan secara terhormat.[30]

Pembangunan gender teraplikasikan dalam kesempatan yang sama yang diberikan hukum Islam, menandakan bahwa seorang perempuan berpotensi untuk hidup mandiri, melindungi perempuan dari marginalitas ekonomi seperti kemiskinan perempuan yang terstruktur. Islam juga menjamin hak atas identitas ekonomi serta hak-hak ekonomi lainnya, seperti hak bekerja, memperoleh penghasilan, hak mendapatkan mahar serta berhak mendapatkan harta warisan.

Derajat perempuan pun diposisikan dengan layak dalam Islam, sehingga perempuan perlu dilindungi, dihargai dan dibangun karakternya sehingga dapat memanfaatkan peluang yang diberikan secara optimal. Kaum laki-laki dan

[30] Damarwati dan Alamsyah, "Gender dan Ekonomi," ..., h. 7.

perempuan tetap bekerja sama dalam meningkatkan aspek pembangunan manusia diberbagai aspek kehidupan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

b. Kemiskinan dalam Ekonomi Islam

Pandangan Ekonomi Islam mengenai kemiskinan menurut pandangan Al-Ghazali yaitu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka.[31] Kemiskinan dalam Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu kemiskinan atas kebutuhan material disebabkan oleh faktor ekonomi yakni ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kemiskinan atas kebutuhan rohani disebabkan kurang tepatnya pengetahuan dan pemahaman agama, atau ada unsur kesengajaan untuk meninggalkan ajaran agama.

Kemiskinan merupakan kondisi yang secara alamiah terjadi, adanya orang kaya karena adanya orang yang tidak berpunya. Ekonomi Islam

[31] Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, h. 23.

memberikan solusi untuk membantu masyarakat miskin dengan memberikan haknya seperti sedekah dan wakaf, serta memberikan bagian masyarakat miskin berupa zakat dengan tujuan agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Kondisi kemiskinan tidak dapat hilang sepenuhnya, namun ekonomi Islam memberikan solusi untuk membantu masyarakat miskin agar harta tidak hanya berputar ditangan orang kaya saja.[32] Sebagaimana firman Allah Swt:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧

Artinya:

> *"Harta rampasan(fai') dari mereka yang diberkan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberkan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang*

[32] Dr. Sulaeman Jajuli, M.EI, Wawancara, 28 September 2021.

dilarang-Nya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya."
(QS. Al Hasyr [59]: 7)[33]

Islam menganggap kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Yusuf Qardhawy melihat bahwa kemiskinan dapat membahayakan kualitas akidah, akhlak, penalaran dan kelogisan dalam berfikir, serta dapat membahayakan lingkungan keluarga dan masyarakat.[34] Fakir dan miskin termasuk *ashnaf* yang berhak menerima zakat, sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ
فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...*, h. 546.
[34] Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 15.

Artinya:

> *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana"* (QS. At-Taubah [9]: 60)[35]

Islam dengan tegas menyatakan bahwa kemiskinan tidak boleh terjadi karena sifat malas berusaha dalam memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan materil maupun spiritualnya. Islam berupaya membangun kualitas diri manusia dengan mendidik saling berbagi dan tolong menolong, tak terkecuali orang miskin. Orang miskin juga perlu berinfak sesuai dengan kemampuannya, sehingga kemiskinan bukan alasan untuk bersikap apatis, individualis, terlebih bersifat kikir. Konsep ekonomi Islam mengajarkan manusia hidup dengan layak, tidak

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 196.

boleh miskin. Manusia diharuskan kuat dalam ekonomi, iman dan islam, agar dapat dengan mudah menunaikan zakat, infak, sedekah dan wakaf.[36]

Konsep tauhid dalam ekonomi Islam mengajarkan jika ingin kaya maka kenalilah yang terkaya yaitu Allah Swt, jika kita ingin sejahtera maka kenalilah yang maha sejahtera yaitu Allah Swt. Seorang manusia yang enggan meminta atau memohon kepada Allah Swt termasuk orang yang sombong. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ekonomi Islam hadir memberikan semangat hidup kepada manusia untuk berusaha, juga meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.[37] Jika ingin mendapatkan kebahagiaan maka carilah ilmu dunia dan tidak melupakan kehidupan akhirat kelak yang dibekali juga dengan ilmu.

[36] Dr. Syihabudin, M.SI, Wawancara, 7 Oktober 2021.
[37] Dr. Syihabudin, M.SI, Wawancara, 7 Oktober 2021.

Islam menekankan kepada pihak yang surplus (mampu) untuk memperhatikan, membela dan memberi perlindungan kepada kelompok miskin. Al-Qur'an memanggil kelompok mampu yang mengabaikan kewajibannya sebagai pendusta agama.

أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ ٢ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ ٣

Artinya:

> *"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?* ***(1)****, maka itulah orang yang menghardik anak yatim* ***(2)****, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin* ***(3)****."* (QS. Al-Ma'un [107]: 1-3)[38]

Upaya pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam dilakukan dengan memberdayakan kaum miskin untuk bekerja diiringi dengan motivasi serta memberikan lapangan pekerjaan yang mampu menghasilkan pendapatan yang layak, mengupayakan jaminan sosial pemungutan, pendistribusian, dan mendayagunakan dana zakat dengan optimal, serta menganjurkan sedekah yang bersifat sukarela. Negara

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 602.

ditekankan turut menjamin penanggulangan kemiskinan dengan menciptakan program bantuan dan penjaminan bagi penduduk miskin.

c. Pengeluaran Per Kapita dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pandangan ekonomi Islam menolak konsep *economic man* yang bersifat rasional dengan mementingkan kepentingan pribadi atau *self interest* sebagai konsep unggulan dari ekonomi konvensional yang menyatakan tujuan akhir dari teori konsumsi adalah memaksimalkan tingkat kepuasan atau memaksimalkan manfaat (*utility maximization*).

Aktivitas konsumsi masyarakat perlu menerapkan konsep *Islamic man* yang berorientasi pada *nafsul muthmainnah* atau pada pencapaian *falah*.[39] Konsep mencapai falah ini mendukung manusia untuk memaksimalkan kemaslahatan (*maslahah maximization*) dalam kegiatan

[39] Beik dan Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, h. 155.

perekonomian. Konsep konsumsi tidak merugikan orang lain serta lingkungan.

Seorang muslim dalam mengeluarkan pendapatannya untuk konsumsi didasarkan pada pertimbangan berbagai prioritas, kesempatan, fungsi utilitas serta kerugian yang ada. Utilitas yang ingin dicapai konsumen muslim yaitu mempertimbangkan *maslahat* dan *mudharat* yang akan ditimbulkan dari mengkonsumsi suatu komoditas.

Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan konsumsi namun tidak konsumtif. Sebagai konsumen, kegiatan konsumsi itu sesuatu yang wajar, karna manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan. Adapun dalam ekonomi Islam, konsumen perlu memahami biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi harus sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Ekonomi islam memandang pengeluaran per kapita sebagai sesuatu yang harus terjadi, karena manusia memiliki 3 kebutuhan diantaranya *ad-*

dhururiyah (kebutuhan primer), *al hayyah* (kebutuhan sekunder) dan *at tahsiniyah* (kebutuhan tersier).[40] Kebutuhan primer yang berorientasi pada dunia dan akhirat, diantaranya yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memeihara harta. Sehingga prioritas kebutuhan duniawi dan rohani perlu adanya keseimbangan.

Pengeluaran konsumsi diperuntukan bagi barang maupun jasa yang halal dan baik dengan tidak berperilaku berlebih-lebihan yang menjurus pada perilaku hedonisme. Seorang muslim pun lebih mengutamakan *saving* dan berinfak. Sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an Surat Al- A'raf ayat 31 yaitu:

۞يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

Artinya:

[40] Dr. Sulaeman Jajuli, M.EI, Wawancara, 28 September 2021.

> *"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."* (QS. Al-A'raf [7]: 31)[41]

Pengeluaran per kapita dalam ekonomi Islam harus bersesuaian dengan ajaran Islam dan meninggalkan segala perilaku aktivitas konsumsi yang menyimpang, seperti perjudian, mengkonsumsi khamar, gharar dan lain sebagainya. Dalam ekonomi Islam, pengeluaran untuk konsumsi berkaitan erat dengan peran keimanan sebagai landasan seorang muslim untuk mengarahkan perilaku manusia dalam kegiatan konsumsi.

Dalam melakukan pengeluaran per kapita, seorang muslim bukan hanya memperhatikan untuk konsumsi makanan atau non makanan saja, perlu tetap memperhatikan hak fakir miskin, berupa zakat dan sedekah.[42] Pengeluaran konsumsi dilakukan dengan memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat terdekat

---

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 154.
[42] Dr. Syihabudin, M.SI, Wawancara, 7 Oktober 2021.

dimulai dari Istri, anak, orang tua, saudara sebagaimana urutan ahli waris. Kemudian ketika kerabat terdekat telah berkehidupan dengan sejahtera maka pengeluaran konsumsi juga perlu memperhatikan lingkungan sosial dengan zakat, infak dan sedekah.

Pilar keseimbangan pengeluaran per kapita dalam ekonomi Islam akan menciptakan perubahan yang positif, seperti terhapusnya berbagai kerusakan ekonomi seperti rasionalitas yang tidak berdasar, pemborosan, berprilaku bermegah-megahan, individualitas, ketamakan, serta kekikiran yang menjadi cerminan sistem kapitalis modern. Ajaran Islam yang mendidik seorang muslim untuk saling membantu akan menciptakan keseimbangan pengeluaran konsumsi yang tetap memperhatikan kebutuhan pribadi dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

d. Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pandangan ekonomi Islam terhadap pembangunan manusia yaitu sebagai ikhtiar yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah Swt.[43] Manusia sebagai modal dasar pembangunan nasional sekaligus faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan suatu negara atau wilayah.

Pembangunan ekonomi didukung oleh kualitas manusia yang mampu meraih keberhasilan materi yang ditunjang dengan pencapaian kekuatan spiritual. Manusia yang bertauhid, berprilaku sesuai dengan akhlak Islam, bebas dan merdeka dapat diraih dengan pendidikan yang menyeluruh.

Pembangunan manusia mengupayakan untuk meningkatkan kapabilitas serta kualitas kehidupan

[43] Natadipurba, *Ekonomi Islam 101*, ..., h. 193.

manusia sesuai dengan syariat yang ditetapkan Allah yang dilakukan secara berkesinambungan. Pembangunan dalam perspektif islam dilakukan berdasarkan pembangunan dalam konteks ibadah, pengetahuan baik dalam pendidikan umum maupun keagamaan, kesehatan serta kelayakan dalam hidup. Manusia berkewajiban untuk memakmurkan bumi Allah dengan penuh tanggung jawab.

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٣٩

Artinya:

> *"Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka."* (QS. Faathir [35]: 39)[44]

[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 439.

Pembangunan manusia bagi ekonomi Islam sangat diutamakan. Hadirnya ekonomi Islam diharuskan mengandung unsur manfaat, *mashlahat*, *falah*, dan mencapai *hasanah* atau kebahagiaan di dunia dan akhirat.[45] Pembangunan manusia bagi ekonomi Islam sesuai dengan firman Allah Swt

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya:

> *"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan"* (QS. Al- Qasas [28]: 77)[46]

Manusia diperintahkan untuk mencari kehidupan akhirat, dan selaras dengan melaksanakan kehidupan

---

[45] Dr. Sulaeman Jajuli, M.EI, Wawancara, 28 Oktober 2021.
[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 394.

dunia sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan tidak membebani orang lain. Manusia diperintahkan untuk berbuat kebaikan pada siapa pun dan tidak membuat kerusakan.

Dalam faktor ekonomi manusia menjadi faktor yang sangat penting. Pembangunan manusia sesuai dengan konsep Islam perlu memperkuat diri dengan pendidikan. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al Qur'an untuk membaca sehingga dapat meraih pengetahuan dan kemampuan yang memadai sehingga hasil kerja yang dilakukan manusia akan bernilai dan bermanfaat.[47] Konsep Islam yang mengutamakan kesehatan yang dibimbing dengan peningkatan kedisiplinan telah diajarkan dalam al-Qur'an untuk menjadikan manusia hidup teratur. Manusia dianugerahi akal agar dapat terus berkembang meraih kesejahteraan.[48] Kesejahteraan yang diharapkan dalam Islam yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat.

[47] Dr. Syihabudin, M.SI, Wawancara, 7 Oktober 2021.
[48] Dr. Syihabudin, M.SI, Wawancara, 7 Oktober 2021.

Kesejahteraan pada manusia dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu *Rabbaniyun* yaitu seseorang yang hanya memprioritaskan ibadah kepada Allah. *Dahriyyun*, yaitu seseorang yang bersifat kapitalis hanya mengejar kebahagiaan dunia *Al Mu'minun*, yaitu seseorang yang seimbang dalam usaha memenuhi kebutuhan di dunia diiringi dengan ibadah kepada Allah Swt sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam merupakan keseimbangan antara unsur material dan spiritual, yaitu unsur dunia dan akhirat. Unsur-unsur ini akan membawa keberhasilan bagi manusia jika dilaksanakan secara utuh. Memakmurkan perekonomian nasional didukung oleh potensi besar modal manusia, karena seluruh ciptaan Allah Swt di bumi ini diperuntukan bagi kemaslahatan umat manusia. Maka dasar-dasar filosofis seperti *Tauhid Rububiyah*, keadilan, *khalifah* dan *tazkiyah*, serta unsur-unsur pembangunan ekonomi Islam perlu dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.